



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Gettar Crista Prahara^{1*}, Maya Puspita Dewi²

^{1,2} Universitas Esa Unggul

Email: * gettar.crista02@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Received: July 18th, 2022

Revised: August 20th, 2022

Accepted: September 17th, 2022

Available online: September 30th, 2022

KEYWORDS

collaborative, governance, ecotourism, Kerinci

A B S T R A C T

This study aims to analyze Collaborative Governance in the development of ecotourism in the Kerinci Seblat National Park in Kerinci Regency, Jambi Province. Strengthening collaboration involving the government, the private sector, and the community is needed in developing ecotourism because all parties are responsible for natural life, economic activities, and welfare simultaneously. This research was conducted using qualitative methods, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Interviews were conducted with 3 (three) staff from the Tourism and Culture Office of Kerinci Regency, 5 (five) ecotourism entrepreneurs around TNKS, and 5 (five) communities around tourist destinations. The results of this study conclude that ecotourism efforts will fail if not all parties provide support for sustainable management. A mapping of the network of actors and their values will provide a picture of the future of the National Park in its ecotourism efforts.

INTRODUCTION

Ekowisata merupakan salah satu andalan dalam industri pariwisata yang berkaitan langsung dengan ekosistem dan bersikap jangka panjang apabila dikelola dengan baik (Yuwono et al., 2021:129). Selain itu, ekowisata memiliki nilai pemanfaatan sumber daya alam, sejarah, sosial, dan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri dan berdampak positif pada kualitas hidup, bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan sosial (Yi et al., 2021). Ekowisata menawarkan keindahan alam yang sangat natural, dengan berbagai keotentikannya dan memberikan berbagai macam pengetahuan mengenai kehidupan flora dan fauna terutama yang berada di kawasan lindung (Rasoolimanesh & Jaafar, 2016).

Penelitian mengenai ekowisata telah banyak dilakukan (Bramwell et al., 2017:1), (Bramwell et al., 2017:1). Para peneliti sepakat bahwa ekowisata mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan kekuatan dan sumber daya internal mereka untuk menjadi mandiri secara



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



ekonomi, menawarkan bantuan positif yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Alfiandri et al., 2021).

Ekowisata juga sering dipandang sebagai bagian dari upaya mendorong pariwisata berkelanjutan karena mempunyai kepedulian terhadap perlindungan lingkungan di sekitar tempat wisata. Oleh karena itu peran dan dukungan dari para pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari perkembangan ekowisata itu sendiri (Y. E. Choi et al., 2021). Tetapi di lain pihak, kurangnya sumber daya manusia, ruang produksi, dan sumberdaya bahan baku, di tambah dengan persaingan dari produk industri, menghambat kemajuan ekowisata di daerah.

Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Kerinci, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2019, pendapatan dari sektor pariwisata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari target pendapatan pariwisata sebesar Rp 755.000.000,00 ternyata hanya tercapai 78 % nya saja atau sekitar Rp 550.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata di Kabupaten Kerinci masih belum tinggi. Hal tersebut diantaranya disebabkan banyak objek wisata yang belum berkembang dan belum tertata dengan baik. Diantara sekian banyak objek pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci, terdapat objek ekowisata yang perlu mendapat perhatian serius yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Urgensi mengangkat TNKS dalam penelitian ini adalah bahwa TNKS ini merupakan kawasan konservasi yang saat ini tata kelolanya perlu diperbaiki, apalagi saat ini makin marak kegiatan perambahan dan perburuan liar, yang mengakibatkan terganggunya habitat dan berdampak langsung pada populasi satwa liar yang dilindungi. Selain itu, pelaku wisata lainnya di sekitar TNKS yang belum berpengalaman sehingga terkesan alakadarnya dalam memberikan pelayanan di bidang pariwisata. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian dari semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran ketiga pihak ini sangat dibutuhkan dalam kerangka collaborative governance. Dengan adanya collaborative governance dalam pengembangan ekowisata diharapkan ekowisata akan tertata dengan baik, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk, mempromosikan budaya dan lingkungan, dan memajukan perekonomian masyarakat lokal sehingga nantinya berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik berkaitan dengan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Kerinci Seblat. Swdangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi Collaborative Governance dalam pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Kerinci Seblat. Adapun lokus pada penelitian ini adalah di bagian Sinergisitas antara lembaga pengelola.

METHOD

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan maksud untuk dapat memotret secara utuh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan menampilkan studi kasus pengelolaan ekowisata TNKS di Kabupaten Kerinci. Data penelitian dikumpulkan dengan metode indepth interview, observasi, dan studi dokumentasi. Interview dilakukan terhadap 3 (tiga) staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, 5 (lima) pengusaha ekowisata di TNKS, dan 5 (lima) masyarakat sekitar destinasi. Interview dilakukan untuk menggali informasi secara



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



komprehensif terhadap informan yang dianggap benar-benar mengetahui mengenai tata kelola kolaboratif ekowisata TNKS. Selain itu, observasi dilakukan terhadap objek penelitian dalam hal ini ekowisata TNKS, dan studi dokumentasi dilakukan terhadap beberapa dokumen terkait seperti peraturan-peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan ekowisata TNKS.

Penentuan informan dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive, yakni mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan yang benar-benar memahami topik dan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan tepat. Jumlah informan tidak didasarkan pada hitungan statistik, tapi tergantung pada kejenuhan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, informannya sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 3 (tiga) staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci, 5 (lima) pengusaha ekowisata di TNKS, dan 5 (lima) masyarakat sekitar destinasi.

RESULT AND DISCUSSION

Taman Nasional Kerinci Seblat

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah kawasan hutan hujan tropis (tropical rain forest) dengan berbagai tipe vegetasi mulai dari hutan dataran rendah (low land forest) sampai hutan pegunungan (mountain forest) serta tipe ekosistem termasuk areal lahan basah (wetland) yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Terdapat tidak kurang dari 4.000 jenis tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat di mana 60% dari jenis tersebut terdapat di hutan dataran rendah. Tumbuhan yang mendominasi adalah suku Dipterocarpaceae, Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae, dan Bombacaceae. Tercatat juga sebesar 300 jenis anggrek, berbagai spesies bambu, kayu manis, rotan, dan edelweis yang langka (*Anaphalis* sp.). Selain itu, terdapat bunga terbesar, *Rafflesia Arnoldi*, *Rafflesia Hasseltii*, dan bunga tertinggi di dunia yaitu *Amorphophallus Titanium*, serta flora langka kantong semar (*Nepenthes* sp.) (Disparbud; 2020).

TNKS memiliki kawasan yang sangat luas, yaitu hampir 1,4 juta hektar yang tersebar di empat Provinsi (Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan). "Maha Taman" ini memiliki topografi yang cukup beragam dan menjelma menjadi berbagai keindahan alam, seperti kawasan lembah, pegunungan, hutan, danau, dan air terjun. Kawasan TNKS merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang semuanya merupakan bagian hutan lindung yang ter-register pada tahun tahun 1921 – 1926, serta cagar alam dan suaka marga satwa yang ditetapkan dalam kurun waktu 1978 -1981, yakni:

1. Provinsi Jambi
 - Cagar Alam: Indrapura (sebagian), Danau Gunung Tujuh dan Bukit Tapan
 - Hutan Lindung: Sangir Ulu, Batang Tebo, Batang sangir, Batang Bungo, Batang Merangin Timur dan Gunung Sumbing Masurai
 - Suaka Marga Satwa: Batang Merangin Barat – Manjuntou Hulu
2. Provinsi Sumatera Barat



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://intropublica.org/index.php/rp)



- Hutan Lindung: Bayang, Batanghari, Kambang, Sangir dan Jujuhan
- Cagar Alam: Indrapura (sebagian)
- 3. Provinsi Bengkulu
 - Suaka Marga Satwa: Bukit Kayu Embun dan Bukit Gedang Seblat
 - Hutan Lindung: Bukit Reges dan Hulu Sulap
- 4. Provinsi Sumatera Selatan
 - Suaka Marga Satwa Rawas Hulu Lakitan

Wilayah TNKS merupakan salah satu kawasan yang paling indah di Pulau Sumatera. Kondisi iklim di TNKS bervariasi menurut topografi, tetapi secara umum kawasan TNKS tergolong ke dalam Tipe A (basah) dalam klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson. Rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.991 mm, dengan bulan kering kurang dari dua bulan per tahunnya. Rata-rata temperatur antara 16°-28° Celcius. Kelembaban relatif udara adalah 77% 92%.

Wilayah TNKS juga memiliki topografi berupa lembah curam yang membelah Pegunungan Bukit Barisan menjadi dua bagian yang sejajar. Sebagai rangkaian bukit dan gunung, TNKS dicirikan oleh ketercuraman lahan sangat curam ($\geq 60\%$) pada sebagian besar kawasannya (70% dari luas kawasan) dengan ketinggian antara 200 hingga 3.805 m dpl. Di kawasan ini banyak dijumpai pegunungan tinggi (lebih kurang terdapat 30 gunung atau bukit), seperti:

- Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera (3.805 m dpl)
- Gunung Tujuh (2.604 m dpl)
- Gunung Seblat (2.383 m dpl)
- Gunung Raya (2.543 m dpl)
- Gunung Nilo (2.400 m dpl)
- Gunung Masurai (2.600 m dpl)
- Gunung Sumbing (2.500 m dpl)

Pegunungan Bukit Barisan membentuk busur gunung berapi besar yang terbentang sepanjang Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bukit Barisan tengah yang gunung berapinya masih aktif dan menjadi bagian kawasan ini ditandai oleh celah lembah datar yang tertutup dengan luasnya sekitar 140.000 ha dan semua sisinya dikelilingi oleh beberapa bagian dari puncak Gunung Kerinci. Pemandangan alam di utara celah lembah bagian tengah didominasi oleh kerucut gunung berapi Kerinci yang masih aktif, sedangkan di bagian utara dan barat daya terdapat danau kawah, yaitu Danau Tujuh dan Danau Kerinci. Topografi daerah ini umumnya curam dan teriris dengan taji yang nyata menurun ke arah timur dan barat dari punggung utara



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



selatan Bukit Barisan. Topografi menaik ini pada akhirnya mengarah ke dataran Sumatera tengah di sebelah timur dan ke dataran pantai sebelah barat.

Manajemen Taman Nasional di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang berada di lintasan garis khatulistiwa. Hingga sekarang, masih banyak ditemukan masyarakat yang hidup dengan pola berburu mengumpul di sejumlah pulau besar di Indonesia. Kondisi ini membuat masyarakat Indonesia lebih cenderung fundamentalis-ekosentris dengan memandang kesatuan dengan alam. Pandangan ini cenderung resistif terhadap wacana taman nasional yang lebih ke arah konservasionis- antroposentris. Hal ini menjelaskan mengapa wacana taman nasional lama baru muncul di Indonesia.

Dalam era ini, manajemen taman nasional masih diarahkan pada kebijakan keanekaragaman hayati. Taman nasional, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya didefinisikan sebagai sebuah area konservasi alam yang memiliki ekosistem alami, yang diatur berdasarkan zonasi berdasarkan kepentingannya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, wisata dan rekreasi alam. Taman nasional kemudian telah diatur lewat sistem zonasi. Zona wajib yang mesti ada adalah zona inti yang mutlak harus digunakan sepenuhnya untuk konservasi. Selain zona inti, variasi zona dapat mencakup zona rimba, zona pemanfaatan penelitian dan pengembangan, zona pemanfaatan tradisional, zona penyangga, zona budidaya, zona rehabilitasi, dan zona pemanfaatan permukiman tradisional dan lainnya. Sistem zonasi ini sebenarnya menggemakan World Network of Biosphere Reserves tahun 1970an yang membagi daerah pelestarian biosfer ke dalam sejumlah zona (Vernhes dan Bridgewater, 2008:28).

Ditambahkan juga di dalam era ini, sejumlah langkah partisipatif memang telah dijalankan dan berhasil seperti di Taman Nasional Wasur, Papua, (Pimbert dan Pretty, 1995:39), Pegunungan Lorenz, Papua (Deddy, 2006:95), Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan (Deddy, 2006:95), dan Bunaken di Sulawesi (Sembiring, 2005). Kebijakan yang menaungi manajemen taman nasional yang muncul di era ini adalah Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1998 tentang Konservasi dan Daerah Terlindungi dan serta Keputusan Menteri Kehutanan No 56 tahun 2006 tentang Zonasi dalam Taman Nasional Keputusan Menteri Kehutanan No 129/Kpts/DJ-VI/1996 tentang Pedoman Penetapan Zonasi Taman Nasional (Eghenter, 2006:168).

Dalam Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1998, taman nasional ditetapkan setidaknya memiliki tiga zona yaitu zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Fungsi zona inti adalah sebagai pelindung ekosistem serta keanekaragaman hayati yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dan jenis tumbuhan serta satwa liar, kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan, dan penunjang zona rimba dan pemanfaatan. Fungsi zona rimba mencakup fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, pengembangan, wisata terbatas, habitat satwa migran, dan penunjang zona pemanfaatan dan pendukung zona inti. Fungsi zona pemanfaatan pariwisata, jasa lingkungan, pendidikan, pengembangan, penelitian, dan pendukung zona inti dan rimba.

Sungguhpun demikian, warisan dari masa lalu menyisakan pemanfaatan lahan berskala besar terdiri dari pemanfaatan ekonomis dan konservasi dalam proporsi yang relatif tidak



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



sebanding. Indonesia memiliki 50 taman nasional dengan luas total taman nasional mencapai 16,4 juta hektar (ditambah 527 hutan konservasi lainnya seperti cagar alam dan suaka margasatwa menjadi seluas 48 juta hektar), luas ini masih tergolong kecil dibandingkan 75 juta hektar tanaman industri (60 juta hektar untuk kayu dan 15 juta hektar untuk tanaman perkebunan) (Young, 2012; Fay, Sirait, dan Kusworo, 2000).

Keduanya saling berkontestansi akibat tidak jelasnya perizinan, definisi hutan, dan kewenangan (Young, 2012). Masalah perizinan dan kewenangan muncul karena pergeseran dalam sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi (Piskorskaya et al, 2012:118). Pergeseran ini mendorong pemerintah lokal bertanggungjawab untuk mengatur sumber daya alam, termasuklah taman nasional.

Studi oleh Beukering, Cesar, dan Janssen (2003) di Taman Nasional Leuser, Sumatera, menunjukkan kalau bahkan dari perspektif ekonomi sekalipun, upaya konservasi lebih unggul daripada upaya deforestasi dan penggunaan selektif, hanya saja manfaat yang diperoleh lebih tersebar. Dalam konteks deforestasi, hanya perusahaan kayu, pemerintah daerah, dan sebagian anggota masyarakat lokal yang diuntungkan secara ekonomi. Keuntungan ini datang dari pendapatan kayu. Dalam konteks konservasi, perusahaan kayu tidak menjadi pihak yang diuntungkan, tetapi jumlah pihak yang diuntungkan menjadi sangat banyak, mulai dari anggota masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat internasional. Keuntungan ini datang dari pasokan air, pariwisata, pencegahan banjir, dan pertanian.

Dalam konteks Indonesia, Eghenter (2006:174) menyarankan langkah-langkah partisipatif dalam manajemen taman nasional antara lain:

- 1) Pengakuan lahan adat secara resmi dan pembangunan dewan adat yang berperan sebagai pengelola taman nasional
- 2) Menerima zona inti de facto sebagai daerah yang terlalu jauh dari permukiman dan tidak dieksploitasi oleh masyarakat lokal namun tetap mempertahankan fungsi ekologis wilayah konservasi
- 3) Membentuk lembaga atau forum antar adat yang mengatur aktivitas manajerial dan masalah lingkungan yang sering melintasi batas adat
- 4) Melestarikan regulasi yang dikembangkan secara lokal mengenai penggunaan hasil hutan yang menjamin keberlanjutan
- 5) Mengakui wilayah yang definitif dan tepat dalam membedakan masyarakat adat dan bukan adat
- 6) Mengakui kalau Taman nasional yang dibangun dalam wilayah masyarakat asli paling baik diatur dan dilindungi sebagai hutan adat

Manajemen partisipatif yang melibatkan beberapa negara juga telah dilakukan. Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dan Philipina mengelola kawasan perairan eko- region Sulawesi. Bersama Malaysia, Indonesia mengelola Taman Nasional Betung Kerihun, Lanjak Entimau, dan Kayan Mentarang. Selain itu, kerjasama dengan Malaysia dan Brunei dilakukan untuk kawasan



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



Jantung Kalimantan seluas 22 juta hektar taman nasional lintas negara yang saling terkoneksi. Di Papua, Indonesia bekerjasama dengan Papua Nugini untuk pengelolaan Taman Nasional Wasur dan Tonda. Di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Indonesia bekerjasama dengan Norwegia (Ministry of Environment, 2006).

Model manajemen lainnya adalah ekowisata. Dalam model ini, taman nasional dibuka untuk kegiatan pariwisata, namun dengan batasan-batasan yang ketat. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa, merupakan contoh yang positif mengenai strategi ekowisata. Pendapatan yang diperoleh taman nasional tidak terlalu besar, namun ini telah cukup baik untuk tingkatan taman nasional dimana sejumlah keterbatasan harus dibuat dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal untuk memperoleh kesejahteraan dan kebutuhan wisatawan untuk memperoleh kepuasan (Nuva et al, 2009).

Manajemen Taman Nasional

Literatur mengenai manajemen taman nasional banyak berangkat dari berbagai kasus yang dialami di berbagai negara. Sejumlah isu manajerial yang muncul dalam pengelolaan taman nasional antara lain:

a. Mana yang Harus Diutamakan: Konservasi atau Ekonomi?

Pembangunan akan berhenti ketika masyarakat asli tinggal di dalam taman nasional. Hal ini tidak akan menjadi masalah jika masyarakat asli memandang itu memang bukan masalah. Mereka akan mungkin memilih hidup sederhana asalkan tinggal di tanah sendiri daripada harus bermigrasi ke luar taman nasional untuk hidup yang lebih baik dalam standar kapitalisme. Keberhentian pembangunan mungkin tidak dapat begitu saja terjadi. Masyarakat lokal tetap terkena pengaruh ekonomi walau bagaimanapun jika tidak diisolasi. Para pengunjung dari kota besar cenderung mencari desa-desa yang terpencil untuk kebutuhan rekreasi (Lankford et al, 2004; Jacob dan Luloff, 1995). Tetapi karena mereka dikendalai secara ekonomi, maka keuntungan dari kunjungan tersebut tidak sampai pada mereka. Hal ini menurut Fennell (2008, 166), tergantung pada bagaimana orientasi masyarakat lokal, berorientasi pada kepuasan pengunjung atau keuntungan.

Pemerintah sendiri dilarang untuk mengusir masyarakat asli dari suatu taman nasional. Zaire Resolution on the Protection of Traditional Ways of Life (IUCN, 1975) melarang hal tersebut dilakukan. Lebih jauh, kebutuhan masyarakat asli harus diperhatikan dalam manajemen taman nasional (Poirier dan Ostergren, 2002:341). Kebijakan ini akan terlihat berkonflik dengan upaya pemerataan pembangunan atau pengentasan kemiskinan yang berskala menyeluruh yang dilakukan oleh negara.

Aspek ekonomi yang harus diperhitungkan bukan saja aspek ekonomi dari masyarakat asli, namun dari taman nasional itu sendiri. Perawatan taman nasional membutuhkan biaya dan biaya ini hadir dari pemerintah. Walau begitu, dana dari pemerintah dapat tidak mencukupi, apalagi bagi negara berkembang. Karenanya, pengelola taman nasional, baik legal atau tidak, dapat mengambil dana dari sumber lain, yang dapat mengorbankan sisi konservasi dari taman nasional.



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://doi.org/10.24127/rp.v1i1.12345)



b. Siapa yang Mengelola

Setidaknya terdapat dua stakeholder taman nasional: pemerintah dan masyarakat asli. Walaupun dua stakeholder ini telah terlihat sangat minim, tapi sesungguhnya terdapat faksi-faksi di dalam masyarakat asli yang berbeda pendapat. Bahkan ketika faksi-faksi di dalam masyarakat asli telah sependapat, terdapat isu kepercayaan terhadap pemerintah yang harus diselesaikan (Chi, 2007:17). Hal ini membuat upaya manajemen bersama akan menjadi sulit. Dalam pemerintahan otoriter, seperti Indonesia di masa lalu, pemerintah dapat dengan tegas dalam mengelola taman nasional tanpa perlu kerjasama dari masyarakat asli.

c. Apa yang dikelola

Taman nasional merupakan sebuah sistem yang sangat luas dan mengandung banyak komponen yang saling berinteraksi. Setiap pengelola taman nasional harus berhadapan dengan tiga pilihan indikator untuk diutamakan:

1. indikator yang mudah diawasi,
2. indikator yang bernilai ekologis, dan
3. indikator yang bernilai bagi stakeholder (Timko dan Innes, 2009:10).

Dalam konteks partisipatif, pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui apa yang harus diprioritaskan dapat menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang dikombinasikan dengan AHP (Analytical Hierarchy Process). Pendekatan SWOT menilai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu langkah (Wehrich, 1992) sementara AHP menilai kekuatan dari faktor-faktor dari sudut pandang stakeholder utama: pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga lingkungan hidup (Masozera et al, 2006:207).

d. Bagaimana Mengelola

Ketika isu siapa yang mengelola dan apa yang harus diutamakan telah mencapai resolusi, bagaimana taman nasional dikelola tidak akan sulit secara teoritis. Ada dua tipe umum manajemen taman nasional yang dapat digunakan: manajemen standar dan manajemen adaptif.

Manajemen standar berlaku bagi aspek-aspek taman nasional yang dapat diprediksi dengan mudah. Dalam pengelolaan jalan misalnya, telah terdapat banyak panduan yang dapat digunakan (misalnya Cole, 1983). Jalan merupakan hal penting karena kepuasan pengunjung didasarkan pada kondisi jalan, kemampuan pengunjung lainnya, kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan berlebih, dan sistem reservasi jalan (Lankford et al, 2004:382).

Manajemen adaptif berhadapan dengan isu lingkungan yang tidak pasti (Markel dan Clark, 2012; Prato, 2006; Ludwig, Hillborn, dan Waters, 1993). Sistem ini diarahkan pada aspek seperti perubahan iklim, wabah penyakit, perilaku spesies, dan siklus alamiah yang terganggu. Langkah manajemen adaptif bersifat kontekstual dimana manajer harus selalu siap untuk menghadapi



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](#)



perubahan tak terduga di lapangan. Sistem manajemen seperti ini akan sulit berkembang dalam kondisi peraturan yang terlalu ketat dan ketidakberanian manajer untuk mengambil risiko.

CONCLUSION

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa TNKS menghadapi masalah umum dalam kompromi antara konservasi dan ekonomi. Fungsi utama dari TNKS sebagai wilayah konservasi berhadapan dengan keberadaan masyarakat adat di dalam TNKS yang harus dilestarikan dan diberi perlakuan khusus dikarenakan memiliki keunikan tersendiri yang jarang ditemukan.

Konsep Ekowisata menekankan betapa pentingnya aspek manusia dalam tata Kelola TNKS. Penerapan tata Kelola kolaboratif pada TNKS memberikan kerangka bagaimana seharusnya wacana ini diinisiasi dan dikelola bersama setiap stakeholder, yaitu lewat model partisipasi. Upaya tata Kelola ekowisata akan gagal jika semua pihak tidak memberikan dukungan bagi pengelolaan yang berkelanjutan.

Pemetaan jaringan antar aktor yang terlibat dalam tata kelola TNKS sangat diperlukan agar memberikan gambaran masa depan TNKS dalam upaya Ekowisata. Selain itu kesepahaman antar aktor atau stakeholder juga dibutuhkan, sehingga menjadikan tata kelola TNKS yang lebih baik.

Dalam kajian tata kelola Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/rp>

RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES

ISSN (Online) 2964-8769



REFERENCE

- Afronyati, Lies (2014). "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia". Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik.
- Ashadi, Reki Wicaksono. "Halal Science: An Introduction". Journal of Halal Reseach. Vol.1 No.1. September 2015
- Aminuddin, M.Z. 2016. Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. Shahih. 1(1): 27-39.
- Ariny, B. D. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Syar'ie. 3(2), 21.
- Chairunnisyah, S. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. Jurnal EduTech. 3(2): 64-75
- Endah, N. H. (2014). Perilaku Pemberian Kosmetik Berlabel Halal oleh Konsumen Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol 22 No. 1, p. 12.
- Faridah, H. D. (2019). "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi". Journal of Halal Product and Research.
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman. 11(2): 449-476.
- Faridah, H. D. (2020) Halal Certification in Indonesia: History, Development and Implementation. Universitas Airlangga: Journal of Halal Product and Research. Vol. XVIII No. 113. Mei-Juni 2015. Pp.32-34;
- Hasan, K. S. (2014) Kepastian Hukum Sertifikasi dan Laelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Dinamika Hukum. 14 (2)
- Hervina, H. (2017). Trend Halal Food Di Kalimantan Timur. Volume 9, No. 1.
- Indrawati (2018) Metode Penelitian Kualitatif. BANDUNG:PT. REFIKA ADITAMA.
- Johan, Eva. (2018). "New Challenges in ASEAN Regional Market: International Trade Framework on Halal Standard". JAKARTA: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal. 1(1): 107 131.
- Koeswinarno. (2020). Sertifikasi Halal; Yes or No. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Nahrowi, N. & Rahman. R. (2014). Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 135-145



Available online at: <https://intropublicia.org/index.php/rp>

**RES PUBLICA:
JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES**

[ISSN \(Online\) 2964-8769](https://doi.org/10.29648/ISSN.2964-8769)



- Rosnan, H., Osman, I., Nor, NM., Aminudin, A. 2015. Halal Certification: An Exploratory Study on Non-certified restaurant. *Advanced Science Letters* (21): 1854-1857.
- Sari, D. I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1)
- Syafrida (-). "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim". *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2.
- Suparto, S., Djanurdi, Yuanitasari, D., Suwandono, A. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3): 427-438.